



RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia- Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Seluma tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Seluma tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran berikutnya.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Seluma pada masa sekarang dan yang akan datang.

KEPALA DINAS



Zuraini, SP., M.Si.
NIP. 19730301 200604 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematikan Penlisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM KEGIATAN OPD	30
3.1. Telaahan kebijakan Nasional.....	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	39
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V. PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sebagai hasil dari sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dalam pembahasan perencanaan di Forum OPD

antara usulan rencana Top Down dengan usulan rencana usulan Bottom Up hasil Musrenbang kecamatan Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perikanan ini adalah :

- a. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tertulis dan gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2025.
- b. Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2.** Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3.** Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4.** REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
- 2.5.** Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1.** Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

- 3.2.** Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3.** Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Seluma ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 5 program dan 15 kegiatan.

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2023

Secara umum ada 2 (dua) Indikator kinerja Dinas Perikanan capaian kinerja sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan terdapat dua indikator kinerja utama yang mengacu pada volume produksi perikanan tangkap (ton) dengan target 2.330 ton dan terealisasi sebesar 2.527 ton atau tingkat capaian 108 %. Dan volume produksi perikanan budidaya dengan target 4.257 ton terealisasi sebesar 4.776 atau tingkat capaian 112%. Dari hasil analisa ini menggambarkan bahwa telah tercapainya produksi hasil perikanan yang telah di targetkan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari APBD Kabupaten Seluma sebesar Rp. 3.345.640.492 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan 3.191.276.395 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Anggaran setelah perubahan. Dengan realisasi Rp. 2.821.160.814 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribuan Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan persentase sebesar

88 %. Adapun penggunaan dana tersebut, sejumlah Rp 2.650.713.814 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) dipergunakan untuk Belanja Langsung, sedangkan Rp. 170.447.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung serta adapun sisa anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.370.115.581 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Seluma

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Seluma

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (30)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=[10/4]
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Alok Perangkat Daerah	65%	1289	1170	91%	63%		
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	5	5	100%	100%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	100%	5		
3	25	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	36	37	99%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	34	34	97%	33		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	100%	4		
3	25	02	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai RKUB	100%	1	1	100%	100%		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	100%	1		
3	25	02	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani	100%	697	662	95%	671		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	5	5	100%	4		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	2	100%	2		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1	1	100%	1		

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	660	636	660	630	95%	640		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	10	15	12	80%	12		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15	5	12	10	83%	10		
3	25	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	344	524	444	85%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	750	320	500	420	84%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12		

3	25	02	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14	24	21	88%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	8	12	12	100%	10		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	6	12	9	75%	8		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3					1		
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	70%	50%	13	13	100%	50%		
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65%	50%	13	13	100%	50%		
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	1	1	100%	1		
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	8							
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	8	2	12	12	100%			

3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70%		13	13	100%	50%		
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	8		10	10	100%	4		
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	8		3	3	100%	3		
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	70%				#DIV/0!	55%		
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	70%	2	34	34	100%	55%		
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Dayakan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6		8	8	100%	5		
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan PembudiDaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5	2	6	6	100%	6		
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10		20	20	100%	4		
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	70%	1673	6004	6004	100%	55%		
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1		
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15	2	23	23	100%	3500		
				Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000	1670	5980	5980	100%	500		

3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang diawasi	70%	0			#D[V/01	55%		
3	25	05	2.0.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	65%	0	5	5	100%	50%		
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1		1	1	100%	1		
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4		4	4	100%	1		
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan	65%	3	21	17	81%	50%		
3	25	06	2.0.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	60%	0	1	1	100%	50%		
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1		1	1	100%	1		
3	25	06	2.0.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65%	0	5	3	60%	50%		
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	8		5	3	60%	2		
3	25	06	2.0.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65%	3	15	13	87%	50%		
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Setu) Daerah Kabupaten/Kota	8	3	15	13	87%	3		

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan, serta perkiraan capaian program dan kegiatan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan Dinas Perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi perikanan
2. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas benih ikan
3. Masih rendahnya mutu, keamanan dan daya saing produk olahan perikanan
4. Masih kurangnya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5. Masih rendahnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas dan ijin usaha
7. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan
8. Perubahan peraturan perundang – undangan dan pedoman kebijakan di bidang perikanan

2.2 Analisis Kinerja Dinas Perikanan

Analisa kinerja pelayanan Dinas Perikanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perikanan digunakan beberapa indikator antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah

yang membidangi Perikanan. Secara umum, pelaksanaan indikator kinerja Dinas Perikanan terealisasi sesuai yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2022-2026. Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma

No	Indikator	SPM/Standar	IKK	Target Renstra Dinas Perikanan				Realisasi Anggaran				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	2219	2330	2446	2568	2527		2568	2697	
			Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	4091	4137	4257	4342	4776		4342	4342	

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan, serta perkiraan capaian program dan kegiatan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan Dinas Perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Seluma yaitu dengan berupaya meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan partisipasi dan kerja pegawai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan taraf hidup nelayan pada khususnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kab. Seluma pada umumnya. Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Dalam menyusun perencanaan strategik dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) difungsikan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sehingga strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman, serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang guna mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Seluma.

1. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTHS)

- a. Kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai Peraturan Bupati Seluma.
- b. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
- c. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar dan intern organisasi serta kebersamaan staf untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
- d. Dukungan dana APBN dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Seluma
- e. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai
- f. Usaha perikanan berkembang dengan cukup baik
- g. Kelompok–kelompok / lembaga masyarakat perikanan yang telah terbentuk dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan perikanan.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana umum di bidang kelautan dan perikanan
- b. Terbatasnya teknologi di bidang kelautan dan perikanan
- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perikanan
- d. Terbatasnya dana APBD untuk pembangunan perikanan
- e. Kurangnya ketersediaan data dan informasi serta akurasi data di bidang kelautan dan perikanan
- f. Belum berkembangnya usaha penangkapan ikan lepas pantai
- g. Kurangnya permodalan usaha perikanan
- h. Rendahnya kemampuan dalam menembus jaringan pasar

2. FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES)

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan
- b. Tersedianya fasilitas kredit lunak dari perbankan dan lembaga keuangan lain
- c. Berkembangnya informasi dan teknologi di bidang perikanan

ANCAMAN (THREATS)

- a. Terjadinya deplesi/penurunan stok sumberdaya ikan di perairan pantai.
- b. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya perikanan
- c. Penggunaan bahan berbahaya dalam usaha pengolahan dan budidaya ikan
- d. Rendahnya daya saing produk perikanan di pasar lokal maupun global
- e. Rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun. Perbandingan antara rancangan awal usulan RKPD tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan Dinas Perikanan sesuai tabel sebagai berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. SELUMA
TAHUN 2025

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	64.532.190,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayani	-		185.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	40.881.140,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayani	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan keles kelompok pelaku usaha perikanan	95 Persen			95 Persen	242.996.440,00						95 Persen	243.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang di Terbitkan	-			1 Dokumen	32.999.790,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayani	-	-	33.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	32.999.790,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayani	-		33.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah FOKLAKSAR yang di Bina	-			5 Kelompok	29.999.990,00			-	3. Penguatan Ketahanan dan Transforma si Ekonomi Seluma Melayani	-	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				8 Unit Usaha	29.999.990,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan Ketahanan dan Transforma si Ekonomi Seluma Melayani	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok/Pelaku Usaha yang mendapat bantuan	-			4 Kelompok	179.996.660,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Selama Melayani	-	-	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,3 Ton	49.996.660,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Selama Melayani	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	130.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Selama Melayani	-		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X	NON URUSAN						394.862.051,00							557.696.760,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						394.862.051,00							557.696.760,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	BB -			BB -	394.862.051,00						BB -	557.696.760,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keaslian dokumen perencanaan	-			100 persen	34.634.500,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Selama Melayani	-	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	34.634.500,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Selama Melayani	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan sesuai SAP	-			100 persen	37.560.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Selama Melayani	-	-	54.000.000,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	41.600.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-		41.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-		162.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			90 persen	78.943.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-	-	138.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	59.943.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-		8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Seluma Melayari	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		J U M L A H							3.549.533.581,00						4.345.892.724,00	

e. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stekholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Bottom-Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relefan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Seluma. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Pasar Ngalam Kec. Air Periukan Kab. Seluma, Kab. Seluma	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Alat Tangkap Ikan (Jaring, Alat Tangkap Kepiting 100 Pkt, Pancing Rawai, Cool Box)	Rp. 100.0000
		Dusun 2, Kab. Seluma		Alat Tangkap Ikan (Jaring, Alat Tangkap Kepiting, Pancing Rawai, Cool Box)	Rp. 100.0000
		Talang Alai, Kab. Seluma		Alat Tangkap Ikan (Jaring, Alat Tangkap Kepiting, Pancing Rawai, Cool Box)	Rp. 100.0000
		Padang Bakung, Kab. Seluma		Alat Tangkap Ikan (Jaring, Alat Tangkap Kepiting, Pancing Rawai, Cool Box)	Rp. 100.0000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Lawang Agung, Kab. Seluma	Tersedianya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Perikanan	Rp. 45.0000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dusun 3 Desa Lawang Agng, Kab. Seluma	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Budidaya	Bibit Unggul Ikan	Rp. 35.0000
		Muara timput, Kab. Seluma		Bibit Unggul Ikan	Rp. 35.0000
		Talang Alai, Kab. Seluma		Bibit Unggul Ikan	Rp. 35.0000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lawang Agung, Kab. Seluma	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Hasil perikanan	Alat Pengelolaan Hasil Perikanan	Rp. 50.0000
		Dusun 3, Kab. Seluma		Alat Pengelolaan Hasil Perikanan	Rp. 50.0000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020- 2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional, KKP telah membangun komunikasi dengan para stakeholders, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya terus berupaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan dan perikanan.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah:

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. Akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI;
- b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);

- c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya;
- d. masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
- e. penerapan good aquaculture practices masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan
- f. sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain:

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum bankable, dan keterbatasan akses permodalan. Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan

investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutudan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru. Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal- kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang

dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (undernutrition) dan kerdil (stunting). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan maka tujuan pembangunan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

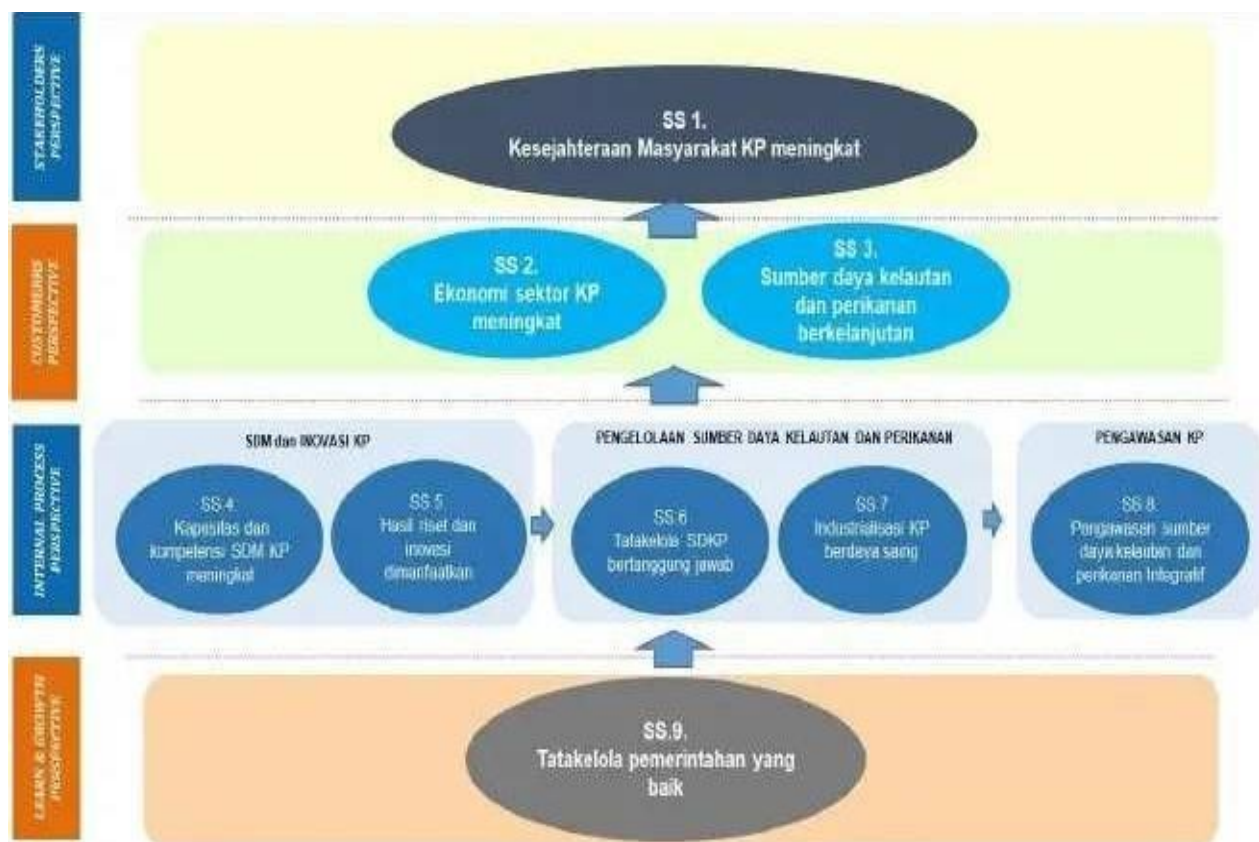
1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020- 2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan Peta Strategi sebagai berikut



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahkan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar di bawah ini.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Dalam rangka merealisasikan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan untuk memberi arah terhadap program / kegiatan OPD secara umum. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Kabupaten Seluma. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan perangkat daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokoknya membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan. Untuk itu berdasarkan visi dan misi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Seluma 2022 – 2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	2568 Ton/Tahun
				Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	4342 Ton/Tahun
				Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan (Ton/Tahun)	4280 Ton/Tahun
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD			BB

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Hal ini berarti kegiatan merupakan bagian dari program dan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dinas Perikanan merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Seluma. Dinas Perikanan melaksanakan 4 (Empat) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan, dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025

Tabel Program Utama dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Seluma
Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor, - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, - Fasilitas Kunjungan Tamu, - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
--	---	--

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PERIKANAN					3.549.533.581,00				3.549.533.581,00	4.345.892.724,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					3.154.671.530,00				3.154.671.530,00	3.788.193.964,00
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.154.671.530,00				3.154.671.530,00	3.788.193.964,00
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah			BB -	2.486.882.970,00				2.486.882.970,00	2.508.194.294,00
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan sesuai SAP			100 persen	2.437.373.610,00			-	2.437.373.610,00	2.462.373.610,00
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	0 Orang/bulan	2.437.373.610,00			-	2.437.373.610,00	2.462.373.610,00
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani			90 persen	14.506.280,00			-	14.506.280,00	14.500.000,00
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	14.506.280,00			-	14.506.280,00	14.500.000,00
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	31.003.080,00			-	31.003.080,00	27.320.684,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	31.003.080,00			-	31.003.080,00	27.320.684,00
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Jasa yang dibayarkan</i>			12 laporan	4.000.000,00			-	4.000.000,00	4.000.000,00
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	4.000.000,00			-	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota</i>			2568.36 Ton/Tahun	186.473.000,00				186.473.000,00	588.000.000,00
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tersedianya Informasi Pengelolaan Penangkapan Ikan</i>			1 Dokumen	107.694.000,00			-	107.694.000,00	483.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	72.700.000,00			-	72.700.000,00	73.000.000,00
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	4 Unit	34.994.000,00			-	34.994.000,00	410.000.000,00
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Ikan			8 Kelompok	78.779.000,00			-	78.779.000,00	105.000.000,00
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Kelompok	43.779.000,00			-	43.779.000,00	70.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha										
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit Usaha	35.000.000,00			-	35.000.000,00	35.000.000,00
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota			4342,35 Ton/Tahun	238.319.120,00				238.319.120,00	448.999.670,00
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang di Berdayakan			10 Kelompok	108.135.030,00			-	108.135.030,00	154.999.670,00
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kelompok	20.137.980,00			-	20.137.980,00	25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Kelompok	29.999.070,00			-	29.999.070,00	30.000.000,00
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	10 Kelompok	57.997.980,00			-	57.997.980,00	99.999.670,00
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya (POKDAKAN)			18 Pokdakan	130.184.090,00			-	130.184.090,00	294.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	24.990.760,00			-	24.990.760,00	29.000.000,00
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	64.532.190,00			-	64.532.190,00	185.000.000,00
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	40.661.140,00			-	40.661.140,00	80.000.000,00
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan</i>			95 Persen	242.996.440,00				242.996.440,00	243.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang di Terbitkan			1 Dokumen	32.999.790,00			-	32.999.790,00	33.000.000,00
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko										
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	32.999.790,00			-	32.999.790,00	33.000.000,00
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLAKSAR yang di Bina			5 Kelompok	29.999.990,00			-	29.999.990,00	30.000.000,00
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	8 Unit Usaha	29.999.990,00			-	29.999.990,00	30.000.000,00
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok/Pelaku Usaha yang mendapat bantuan			4 Kelompok	179.996.660,00			-	179.996.660,00	180.000.000,00
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	0,3 Ton	49.996.660,00			-	49.996.660,00	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Pelaku Usaha	130.000.000,00			-	130.000.000,00	130.000.000,00
	X	NON URUSAN					394.862.051,00				394.862.051,00	557.698.760,00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					394.862.051,00				394.862.051,00	557.698.760,00
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah			BB -	394.862.051,00				394.862.051,00	557.698.760,00
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan			100 persen	34.634.500,00			-	34.634.500,00	30.000.000,00
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	5 Dokumen	34.634.500,00			-	34.634.500,00	30.000.000,00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan sesuai SAP			100 persen	37.560.000,00			-	37.560.000,00	54.000.000,00
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	37.560.000,00			-	37.560.000,00	54.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai RKUB			100 persen	22.000.000,00			-	22.000.000,00	22.000.000,00
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		DANA TRANSFER UMUM-	4 Laporan	22.000.000,00	-		-	22.000.000,00	22.000.000,00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani			90 persen	102.124.551,00			-	102.124.551,00	110.098.760,00
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	6.097.050,00			-	6.097.050,00	6.100.000,00
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	7.500.000,00				7.500.000,00	16.998.760,00
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	12.000.601,00			-	12.000.601,00	12.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	14.000.900,00			-	14.000.900,00	14.000.000,00
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Seluma, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	1 Laporan	16.000.000,00			-	16.000.000,00	16.000.000,00
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	46.526.000,00			-	46.526.000,00	45.000.000,00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa yang dibayarkan			12 laporan	121.600.000,00			-	121.600.000,00	203.600.000,00
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	41.600.000,00			-	41.600.000,00	41.600.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JUMLAH						
						TAHUN -1	TAHUN 2025					TAHUN+1
							BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFE R	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	80.000.000,00			-	80.000.000,00	162.000.000,00
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			90 persen	76.943.000,00			-	76.943.000,00	138.000.000,00
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	59.943.000,00			-	59.943.000,00	110.000.000,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seluma diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma diwaktu yang akan datang.